**BUKU JAWABAN TUGAS MATA KULIAH**

**TUGAS 3**

**Nama Mahasiswa : Yova Nelindy**

**Nomor Induk Mahasiswa/ NIM : 044952617**

 **Kode/Nama Mata Kuliah : HKUM4209/Ilmu Negara**

**Kode/Nama UPBJJ : 14/ Universita Terbuka Padang**

 **Masa Ujian : 2022/23.2(2023.1)**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TERBUKA**

Soal

1. Pertanyaan:

Analisis bentuk pemilihan yang ada pada negara bersusun tunggal (pada soal diwakili oleh Indonesia) dan negara bersusun banyak (Amerika)!

Jawaban :

Indonesia dan Amerika Serikat termasuk ke dalam negara demokratis. Tentunya penerapan demokrasi Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perbedaan. Selain itu, jika dilihat dari bentuk negara, Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perbedaan. Tujuan pada penulisan ini yakni diperuntukkan membuktikan kaitan demokrasi dan bentuk negara pada sistem pemilihan Presiden di Indonesia melalui popular vote dan di Amerika Serikat dengan electoral college, untuk membuktikan diskursus pemilihan system pemilihan Presiden di Indonesia dengan popular vote dan di Amerika Serikat dengan electoral college.

Penelitian menggunakan jenis penelitian yaitu normatif (normative), yakni sebuah jenis penelitian

dengan mengkaji serta memberikan analisis-analisis ketentuan suatu peraturan perundang-undangan dan sumber yang tertulis yang lain. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yakni pendekatan perbandingan. Pendekatan perbandingan dilaksanakan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.

Studi perbandingan hukum yakni aktivitas untuk melakukan perbandingan hukum sebuah negara

dengan hukum negara lainnya, maka dalam konteks ini adalah Indonesia dan Amerika Serikat. Jadi, popular vote di Indonesia serta electoral college di Amerika Serikat tentunya mempunyai diskursus. Hal tersebut mengingat betapa kompleksnya sistem Pemilihan Presiden tersebut

Pemilihan di negara bersusun tunggal (Indonesia) dan negara bersusun banyak (Amerika Serikat) memiliki perbedaan dalam hal bentuk pemilihan dan sistem pemilu. Berikut adalah lima fakta perbedaan pemilu di Indonesia dan Amerika Serikat:

1. Bentuk Pemilihan:

- Indonesia: Indonesia memiliki sistem pemilihan langsung di mana rakyat memilih langsung wakil-wakil mereka, seperti presiden, anggota parlemen, dan kepala daerah.

- Amerika Serikat: Amerika Serikat memiliki sistem pemilihan tidak langsung atau sistem Electoral College di mana pemilih tidak memilih langsung presiden, tetapi memilih elektor yang kemudian memilih presiden.

2. Sistem Partai Politik:

- Indonesia: Indonesia menggunakan sistem multipartai, di mana ada banyak partai politik yang berkompetisi dalam pemilu.

- Amerika Serikat: Amerika Serikat juga menggunakan sistem multipartai, tetapi dominasi dua partai besar, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik, menjadi ciri khas pemilu di negara ini.

3. Pendanaan Kampanye:

- Indonesia: Pendanaan kampanye di Indonesia terbatas dan diatur oleh undang-undang. Partai politik dan calon diwajibkan untuk melaporkan sumber dana kampanye mereka.

- Amerika Serikat: Amerika Serikat memiliki sistem pendanaan kampanye yang lebih terbuka. Kampanye politik didanai baik oleh individu, kelompok, atau lembaga swasta, termasuk melalui donasi pribadi yang tidak dibatasi oleh undang-undang.

4. Partisipasi Pemilih:

- Indonesia: Partisipasi pemilih di Indonesia relatif tinggi, meskipun ada beberapa tantangan dalam hal keterlibatan pemilih di daerah-daerah terpencil.

- Amerika Serikat: Tingkat partisipasi pemilih di Amerika Serikat cenderung bervariasi. Pada pemilihan presiden, tingkat partisipasi umumnya lebih tinggi daripada pemilihan lokal dan midterm.

5. Penentuan Pemenang:

- Indonesia: Pemenang dalam pemilihan di Indonesia ditentukan berdasarkan mayoritas suara atau sistem first-past-the-post, di mana calon dengan suara terbanyak menjadi pemenang.

- Amerika Serikat: Pemenang pemilihan presiden di Amerika Serikat ditentukan oleh Electoral College, yaitu calon yang memenangkan mayoritas suara elektor dalam negara bagian.

Perbedaan-perbedaan ini menggambarkan karakteristik unik dari sistem pemilihan di Indonesia dan Amerika Serikat. Setiap negara memiliki aturan dan prosedur yang berbeda untuk menentukan wakil-wakil dan pemimpin mereka.

Sumber : [file:///C:/Users/user/Downloads/81777-1033-254545-1-10-20220114.pdf](file:///C%3A/Users/user/Downloads/81777-1033-254545-1-10-20220114.pdf)

2. Soal

Simpulkan menurut pendapat anda konsep federal yang ada pada kasus di atas (empirisme)

dibandingkan dengan teori ahli!

Jawaban :

Menurut teori kedaulatan negara oleh Jean Bodin dan George Jelinek: Kekuasaan tertinggi ada pada negara dan negara mengatur kehidupan anggota masyarakatnya.

Dalam kasus yang disebutkan di atas, di mana terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan entitas-entitas daerah, serta adanya prinsip federal, dapat kita lihat bahwa ada kesesuaian antara kasus tersebut dengan konsep federal dalam teori ahli.

Dalam kasus tersebut, entitas-entitas daerah memiliki pemerintahan sendiri yang mempertahankan sebagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal ini sesuai dengan konsep federal dalam teori Johannes Althusius, yang menekankan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan entitas-entitas daerah. Selain itu, konsep federal juga memperkuat keberadaan sistem pengadilan federal yang mandiri, seperti yang dinyatakan oleh teori Alexander Hamilton.

Namun, perlu dicatat bahwa dalam kasus tersebut, tidak dijelaskan secara rinci mengenai bagaimana pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan entitas-entitas daerah dilakukan. Oleh karena itu, untuk memberikan analisis yang lebih mendalam, informasi tambahan mengenai kerangka konstitusional, hubungan antara pemerintah pusat dan entitas-entitas daerah, serta peran sistem peradilan federal akan diperlukan.

Dalam kesimpulan, kasus yang disebutkan sejauh ini mengindikasikan adanya konsep federal yang sesuai dengan teori ahli, khususnya dalam hal pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan entitas-entitas daerah serta peran sistem peradilan federal. Namun, analisis yang lebih mendalam memerlukan informasi tambahan untuk memahami secara lengkap implementasi konsep federal dalam konteks kasus tersebut.

Sumber : uns.ac.id

3. Soal

Dari contoh kasus di atas terlihat konsep pemisahan kekuasaan yang ada di Amerika. Analisis manfaat pemisahan kekuasaan seperti yang digunakan Amerika terkait proses pemilu di negaranya!

Jawaban :

Dilihat dari definisinya, pemisahan kekuasaan (separation of powers) merupakan pemisahan kekuasaan yang dipertahankan secara tegas dalam fungsinya. Berdasarkan definisi ini, kekuasaan dibagi menjadi tiga, yakni legislatif, eksekutif, serta yudikatif.

Pemisahan kekuasaan adalah prinsip dasar dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat. Prinsip ini ditegakkan melalui pembagian kekuasaan antara tiga cabang pemerintahan yang independen, yaitu kekuasaan eksekutif (Presiden dan pemerintah federal), kekuasaan legislatif (Kongres), dan kekuasaan yudikatif (Mahkamah Agung). Adanya pemisahan kekuasaan ini memiliki manfaat yang signifikan terkait proses pemilu di negara tersebut, antara lain:

Pembatasan kekuasaan: Pemisahan kekuasaan memastikan bahwa tidak ada satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan yang berlebihan. Dalam konteks pemilu, ini berarti tidak ada kekuatan yang dominan yang dapat memanipulasi atau mengendalikan seluruh proses pemilihan. Setiap cabang pemerintahan memiliki peran dan kewenangannya sendiri, sehingga dapat saling mengawasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Pengawasan dan keseimbangan: Pemisahan kekuasaan memungkinkan cabang pemerintahan saling mengawasi dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Dalam konteks pemilu, Kongres memiliki peran penting dalam mengawasi proses pemilihan, termasuk penyusunan undang-undang pemilu, pengawasan pelaksanaan pemilu, dan verifikasi hasil pemilu. Hal ini membantu memastikan transparansi, integritas, dan keadilan dalam proses pemilihan.

Perlindungan hak-hak individu: Pemisahan kekuasaan juga berhubungan erat dengan perlindungan hak-hak individu. Keberadaan sistem pemisahan kekuasaan membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengancam hak-hak warga negara, termasuk hak untuk memilih dan berpartisipasi dalam proses politik. Setiap cabang pemerintahan memiliki peran dalam melindungi dan menjaga integritas pemilihan.

Keberlanjutan pemerintahan: Pemisahan kekuasaan memastikan keberlanjutan pemerintahan yang stabil. Dalam konteks pemilu, transisi kekuasaan yang aman dan damai dapat terjadi karena adanya lembaga yang independen untuk menangani pemilihan dan penentuan hasil pemilu. Meskipun terdapat perubahan kepemimpinan politik, prinsip pemisahan kekuasaan memastikan kelangsungan proses demokratis yang stabil.

Sumber : kompas.com